

"Kota Yang Baik Adalah Kota Yang Fokus Pembangunannya"

“**SALAH SATU** yang menjadi penyebab kekacauan di Indonesia saat ini, adalah pembangunan tata ruang. 61 tahun Indonesia merdeka, kita belum memiliki UU Tata Ruang yang punya kekuatan dan bisa ditaati oleh semua *stake holder*,” buka Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Syaifullah Yusuf pada sebuah sesi diskusi mengenai tata ruang di PB NU Jakarta baru-baru ini.

“Saat ini, kita mutlak memerlukan adanya UU Tata Ruang yang baik. Jika Perlu UU yang saat ini sedang direvisi di DPR nantinya juga memuat sangsi tegas bagi pelanggarnya,” harapnya.

Hal ini dikarenakan, di dalam UU yang sekarang sedang direvisi, sama sekali tidak menyebutkan adanya sangsi bagi pelanggaran Tata Ruang. UU Tata Ruang tambahnya, merupakan contoh UU tanpa sanksi, karena UU Tata Ruang tersebut tanpa sanksi maka adanya UU tersebut seperti ‘tidak ada’.

Gus Ipul, panggilan akrab Syaifullah Yusuf mencontohkan bahwa pihaknya sering melihat berbagai daerah yang ada di Indonesia, memiliki pola pembangunan yang tampak tidak keruan.

Dikisahkannya, dahulu Syaifullah sering mengunjungi kota Yogyakarta dan Malang, kota yang berjuluk sebagai kota pelajar. Namun saat ini, baik Kota Yogyakarta dan Malang sudah tidak lagi menunjukkan jati dirinya sebagai kota pelajar.

Penataan ruang di kedua kota tersebut sungguh membingungkan.

“Dimasukkan ke kategori kota pelajar, kota wisata ataupun kota industri tidak ada yang pas. Akhirnya, kedua kota ini menjadi kota yang bukan-bukan,” katanya.

Karena tidak adanya konsep pembangunan tata ruang yang baik di kedua kota tersebut, para pengambil kebijakan tidak dapat konsisten pada perencanaan yang telah ditetapkan semenjak awal, buntutnya segala sesuatu mungkin dan dapat dibangun di sana.

Padahal, diingatkannya salah satu ukuran sukses pembangunan adalah pada akurasi perencanaan dan konsistensi pelaksanaan. Jika pelaksanaannya akurat, dan pelaksanaannya pun konsisten, maka sebuah pembangunan akan mendekati keberhasilan.

Saat ini semua orang dapat

Karena tidak adanya konsep pembangunan tata ruang yang baik di kedua kota tersebut, para pengambil kebijakan tidak dapat konsisten pada perencanaan yang telah ditetapkan semenjak awal, buntutnya segala sesuatu mungkin dan dapat dibangun di sana.

Demikian pula DKI Jakarta, “DKI juga bukan kota pemerintahan, bukan pula kota ekonomi, bukan kota jasa, bahkan cenderung menjadi kota ‘gado-gado’, apa saja ada,” kata politisi yang baru menjadi pengurus di PPP ini.

Menyitir sebuah ayat di Alqur’an tambah Gus Ipul, sudah terbukti bahwa terjadi kerusakan di muka bumi karena tangan manusia. “Saat ini, saat musim hujan kita banjir, sedangkan kalau musim kering kekeringan,” tambahnya. Hal ini disebabkan oleh buruknya penataan ruang, pengelolaan lingkungan yang menyebabkan kerusakan alam, baik hutan maupun lingkungan kita.

“Kondisi riel, saat ini 100.000 hektar lahan pertanian setiap tahunnya beralih fungsi, menjadi lahan apa saja. Padahal

lahan pertanian yang subur, tidak bisa digantikan oleh tanah yang lain,” katanya. Wajar, jika setiap tahunnya produksi beras kita terus turun.

Dikatakannya, adab nenek moyang Bangsa Indonesia, yang selalu menanam dua buah pohon ketika menebang sebuah pohon, tampaknya patut ditiru oleh gene-



rasi muda.

“Perlu adanya kesadaran masyarakat disamping perlunya Undang-undang Tata Ruang yang tegas, bahwa ada sesuatu yang sangat penting yang menjadi kebutuhan kita bersama, yaitu soal lingkungan, saat ini,” tandasnya.

dri